

KHARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA MISKIN DI KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

Rusda Khairati^{1*} dan Rahmat Syahni¹

¹ Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

*Email: ruskhairati@yahoo.co id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kampung Keluarga Berencana (kampung KB) Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di 5 (lima) kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dengan metoda survei melalui wawancara dengan kepala keluarga di Kampung KB dari bulan Juli sampai dengan September 2018. Variabel yang digunakan adalah: umur kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, pekerjaan utama, keterampilan, pemilikan aset, status pemilikan lahan, lama bekerja, pendapatan per kapita, keikutsertaan dalam program KB, jumlah anggota keluarga, dan jumlah anak. Metoda analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Kampung KB memiliki anak lebih dari 2 orang (62,8%), anggota keluarga lebih dari 4 orang (56,6%), hanya sebagian (49,1%) yang ikut KB, dan pendapatan/kapita dibawah Rp. 400 ribu/bulan (85,7%). Kepala rumah tangga umumnya berumur antara 30-50 tahun (70,3%), berpendidikan SD (54,8%), pekerjaan bertani (57,1%), tidak memiliki lahan sendiri (57,0%), tidak memiliki aset (65,1%), tidak memiliki keterampilan khusus (84,6%), dan bekerja selama 5-8 jam sehari (83,4%).

Kata kunci : karakteristik sosial ekonomi, rumah tangga miskin, kampung KB

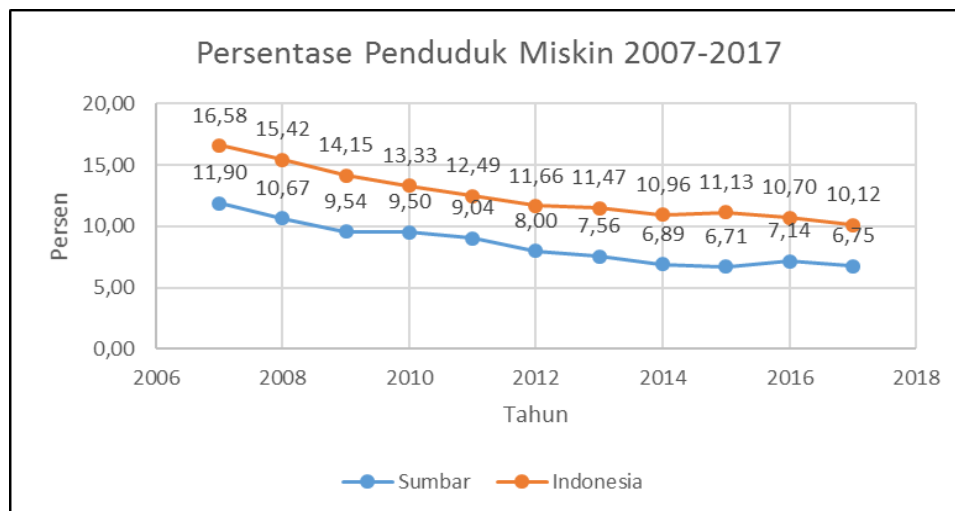
PENDAHULUAN

Pada saat ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, dimana pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta (BPS, 2018), diantaranya terdapat 364 ribu merupakan penduduk miskin di Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2018). Program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan pada era orde reformasi, setelah terjadinya krisis moneter diantaranya adalah : program jaringan pengaman sosial, bantuan beras untuk orang miskin, bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, program-program pemberdayaan masyarakat seperti

program PNPM dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data perkembangan penduduk 10 tahun terakhir, terlihat bahwa usaha-usaha pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil. Persentase penduduk miskin di Inodnesia pada tahun 2007 sebesar 16.58% telah menurun menjadi 10.12% pada tahun 2017 (Gambar 1). Demikian pula di Sumatera Barat, program penanggulangan kemiskinan telah dapat menurunkan persentase penduduk miskin dari 11.90% tahun 2007 menjadi 6.75% tahun 2017.

Dibandingkan dengan persentase kemiskinan pada tingkat nasional di Indonesia, angka kemiskinan di Sumatera Barat jauh lebih rendah. Walaupun demikian angka tersebut masih menyisakan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Apalagi bila dilihat dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskikan relatif stagnan. Walaupun ada penurunan namun tidak terlalu signifikan, bahkan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Sumatera Barat naik dari 6.71% tahun 2015 menjadi 7.14% tahun 2016, sehingga masih tersisa sebanyak 351.510 jiwa penduduk miskin.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat dan di Indonesia Tahun 2007-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Berdasarkan angka-angka di atas masih diperlukan program penanggulangan kemiskinan dengan terobosan baru yang menggunakan pendekatan integratif dan komprehensif sehingga dapat menekan angka kemiskinan secara lebih signifikan.

Penduduk miskin, yaitu penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018). Jumlah penduduk miskin Sumatera Barat, relatif lebih rendah dari tingkat nasional, namun masih relatif tinggi dimana pada September 2017 mencapai 359.990 orang atau 6,75 persen dari seluruh penduduk Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2018).

Salah satu program yang telah dicanangkan oleh Presiden dalam rangka pengendalian penduduk dan sekaligus pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB adalah suatu wilayah setingkat desa atau jorong yang dipilih dengan kriteria tertentu untuk dijadikan titik sasaran dalam melaksanakan program pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan Penduduk (BKKBN, 2015). Salah satu kriteria pemilihan kampung KB adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Dengan kondisi kampung KB yang serba kekurangan tersebut, berbagai program pembangunan lintas sektor dilaksanakan untuk mengubah keadaan menjadi kondisi yang lebih baik. Diharapkan keberhasilan pembangunan di kampung KB, akan berakumulasi menjadi keberhasilan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten secara berjenjang. Di Sumatera Barat saat ini telah dicanangkan sebanyak 208 kampung KB pada 19 kabupaten/kota yang ada, namun ada informasi awal mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di kampung KB.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab adalah bagaimana karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin di kampung KB Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi kemiskinan rumah tangga di kampung KB Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008) kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak bagi kehidupan seseorang. Definisi kemiskinan ini mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya.

Akhir-akhir ini pengertian kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu definisi orang miskin tidak cukup hanya dilihat dari sudut pemenuhan konsumsi saja karena: (1) pengertian ini sering tidak berhubungan dengan definisi kemiskinan yang dimaksud oleh orang miskin itu sendiri, dan tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) pengertian tersebut dapat menjerumuskan kepada kesimpulan yang salah, bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai, dan (3) pengertian tersebut telah terbukti tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika merumuskan kebijakan lintas sektoral dan bisa kontra produktif (Smeru, 2016).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar Rp354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016. Garis kemiskinan di perkotaan secara nasional Rp 364.527 per kapita per bulan dan di perdesaan secara nasional Rp 343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017). Dalam penghitungan setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan masing-masing provinsi yang besarnya bervariasi sesuai dengan harga komoditas bahan pokok makanan dan bukan makanan.

Haughton dan Khandker (2009) melihat pola kemiskinan berdasarkan empat karakteristik, yaitu : 1) karakteristik wilayah; 2) karakteristik masyarakat; 3)

karakteristik rumah tangga, dan 4) karakteristik individu. Karakteristik wilayah yang mempengaruhi adalah adanya perbedaan wilayah yang terisolasi dan terpencil yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Karakteristik masyarakat dilihat dari akses terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar, yang dapat diukur jumlah dan jarak infrastruktur dasar yang tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Sedangkan karakteristik rumah tangga yang mempengaruhi peluang rumah tangga miskin adalah: umur kepala rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, keterampilan, pemilikan aset, lama bekerja, jumlah anak, jumlah anggota rumah tangga, dan pendapatan per kapita.

Kampung KB adalah satu kesatuan wilayah setingkat dusun/RW dengan kriteria tertentu dimana terdapat program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Januari 2016, yang diharapkan akan menjadi miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat terendah. Sampai saat ini sudah terbentuk sebanyak 208 Kampung KB di Sumbar. Kampung KB bertujuan untuk membumikan secara total program KKBPK dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pelayanan program KKBPK sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain bertujuan untuk memusatkan pengendalian jumlah penduduk, kampung KB juga merupakan wadah sasaran dalam menanggulangi masalah kemiskinan dalam wilayah terkecil atau wilayah pinggiran.

METODA PENELITIAN

Variabel karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin yang akan dilihat terdiri dari : Umur Kepala Rumah Tangga, Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga, Keterampilan Yang Dimiliki Kepala Rumah Tangga, Pemilikan Aset Rumah Tangga, Pemilikan Lahan Rumah Tangga, Lama Bekerja Kepala Rumah Tangga, Pendapatan Per Kapita Keluarga, Jumlah anggota keluarga, Jumlah anak,

dan Keikutsertaan Program KB. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan instrumen daftar pertanyaan yang dilakukan terhadap keluarga miskin di kampung KB. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui publikasi resmi instansi terkait, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Untuk pengambilan data primer berupa data keluarga miskin di kampung KB dilakukan dengan mengambil Kampung KB yang telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Pengambilan sampel keluarga miskin di Kampung KB dilakukan dengan Teknik Penarikan Sampel Bertahap (*Multistage Random Sampling*). Tahap pertama adalah memilih kabupaten kota, tahap kedua memilih sampel kampung KB pada kabupaten/kota terpilih, dan tahap ketiga memilih keluarga miskin pada kampung KB terpilih. Dengan demikian satuan penarikan sampel terkecil yang digunakan adalah keluarga miskin. Dari 12 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Barat, diambil 3 kabupaten dan 2 kota dari seluruh kabupaten kota berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak dan wilayah daratan dan pesisir. Pemilihan kabupaten dan kota dilakukan secara purposif, dengan kriteria terdapat kabupaten kota yang mewakili daratan dan mewakili pesisir. Kabupaten yang mewakili daratan yang terpilih adalah Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok, sedangkan kabupaten yang mewakili pesisir adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Sampel Kampung KB

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Kampung KB	Jumlah Sampel Kampung KB	Sampel Keluarga Miskin
1	Kabupaten Agam	32	6	65
2	Kab Solok	14	3	30
3	Kab Pesisir Selatan	16	3	30
4	Kota Padang	11	3	30
5	Kota Payakumbuh	7	2	20
	Sumatera Barat	80	17	175

Kota yang mewakili daratan adalah kota Payakumbuh, dan kota yang mewakili pesisir adalah Kota Padang. Pada setiap kabupate/kota terpilih, dipilih sampel kampung KB sekitar 20% dari jumlah kampung KB di kabupaten/kota tersebut. Pemilihan kampung

KB dilakukan secara acak. Sedangkan pemilihan keluarga pada setiap kampung KB sampel ditetapkan kuota sebanyak 10 keluarga miskin yang dapat ditemui secara aksidental. Rekapitulasi penetapan sampel keluarga miskin pada kampung KB dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, data dianalisis dengan analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah ditabulasi dan diringkas menurut variabel yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga

Kepala rumah tangga miskin pada kampung KB umumnya berada pada usia dewasa dan produktif, yaitu antara 30 sampai 59 tahun. Sebanyak 30,9% berada pada rentang usia 30-39 tahun, 39,4% berada pada rentang usia 40-49, dan 20,0% pada rentang usia 50-59 tahun. Hanya sedikit (1,7%) yang berada dibawah 30 tahun dan 6,3% pada usia 60 tahun keatas. Hal yang sama juga dijumpai pada masing-masing kabupaten/kota dimana usia kapala rumah tangga berada pada usia dewasa atau usia produktif. (Tabel 2.).

Tabel 2. Umur Kepala Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Umur kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
20-29	3.1%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	1.7%
30-39	24.6%	36.7%	40.0%	33.3%	25.0%	30.9%
40-49	43.1%	33.3%	36.7%	36.7%	45.0%	39.4%
50-59	18.5%	23.3%	16.7%	23.3%	20.0%	20.0%
60 tahun lebih	10.7%	6.6%	3.3%	6.7%	10.0%	8.0%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari segi pendidikan sebahagian besar kepala rumah tangga miskin di kampung KB masih berpendidikan rendah. Dimana lebih dari separuh (54,8%) kepala rumah tangga miskin berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SD, 22,9% berpendidikan

tamat SMP, dan hanya 22.3% tamat SMA. Dari data per kabupaten/kota angka tersebut terlihat hampir sama, dimana di kabupaten Agam kepala rumah tangga yang berpendidikan tamat SD dan tidak tamat SD mencapai 64,6%, di kabupaten Solok 76,6%, dan di kota Payakumbuh 65,0%.

Tabel 3. Pendidikan Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Pendidikan Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tidak Tamat SD	20.0%	13.3%	46.7%	10.0%	20.0%	21.7%
Tamat SD	44.6%	20.0%	30.0%	16.7%	45.0%	33.1%
Tamat SMP	20.0%	20.0%	20.0%	36.7%	20.0%	22.9%
Tamat SMA	15.3%	46.7%	3.3%	36.7%	15.0%	22.3%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Sementara di kabupaten Pesisir Selatan angka ini agak rendah yaitu kepala keluarga rumah tangga miskin Tamat SD dan Tidak Tamat SD sebanyak 33,3% dan di kota Padang 26,7%. Namun demikian di Pesisir Selatan terdapat 46,7% kepala rumha tangga miskin yang berpendidikan SMA dan di kota Padang sebanyak 36,7% (Tabel 3).

Hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rejekiningsih (2011) yang dilakukan di Kota Semarang, dan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini, A. S dan Lilik S (2016). Penelitian Rejekiningsih yang menunjukkan bahwa di kota Semarang, ciri warga miskin antara lain adalah rendahnya pendidikan kepala rumah tangga (tamat SD). Sedangkan penelitian Rini, A.S dan Lilik S menunjukkan bahwa kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan miskin lebih tinggi. Hasil penelitian Nopriansyah *et all*, juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa karakteristik rumah tangga miskin di Provinsi Jambi mayoritas dari kepala rumah tangga berpendidikan rendah (di bawah SMP).

Pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin di kampung KB umumnya adalah bertani dimana lebih dari separuhnya yaitu (57,1%). Hal ini ditemui terutama di wilayah kabupaten, dimana di Kabupaten Agam sekitar 69,2% pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin adalah bertani, di kabupaten Pesisir Selatan sebesar 90,0% dan di Solok

86,7%. Sementara di perkotaan, di kota Padang pekerjaan kepala keluarga umumnya adalah tukang 30%, dan dagang 20% dan di kota Payakumbuh pekerjaan kepala keluarga rumah tangga miskin umumnya juga berdagang dan bertukang (Tabel 4).

Tabel 4. Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin di Kampung KB

Pekerjaan Utama Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tani	69.2%	90.0%	86.7%	0.0%	10.0%	57.1%
Nelayan	7.7%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	4.6%
Dagang	3.1%	3.3%	0.0%	20.0%	25.0%	8.0%
Tukang	7.7%	0.0%	0.0%	30.0%	30.0%	11.4%
Pegawai	1.5%	6.7%	0.0%	6.7%	0.0%	2.9%
Buruh	4.6%	0.0%	10.0%	20.0%	20.0%	9.1%
Lain-lain	6.2%	0.0%	3.3%	13.2%	15.0%	6.9%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Nopriansyah et all (2015), dan penelitian Saputro, A.E.S (2010). Dari hasil peneitian Nopriansyah di Provinsi Jambi ditemukan bahwa mayoritas kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Demikian juga penelitian Saputro, yang melakukan penelitian di 15 Provinsi di Indonesia pada tahun 2007 juga menemukan bahwa sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian.

Dari sisi keterampilan kepala rumah tangga keluarga miskin, sebahagian besar (84,6%) kepala keluarga rumah tangga miskin tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja. Secara rinci bila dilihat di masing-masing kabupaten dan kota yang diteliti terlihat kecenderungan yang sama, dimana tingginya angka kepala keluarga rumah tangga miskin yang tidak memiliki keterampilan : di kabupaten Pesisr Selatan terdapat sekitar 96,6% 96,7%, di Kabupaten Solok 96,7%, di kota Padang 79,9%, dan di kota Payakumbuh 80,0%. Terdapat beberapa jenis keterampilan yang dimiliki oleh kepala keluarga seperti keterampilan listrik, montir, menjahit, dan lain-lain, akan tetapi jumlahnya sangat sedikit sehingga pendapatan yang diterima dari pekerjaan yang tidak memerlukan

keterampilan khusus tidak memadai untuk menghidupi keluarga. Seperti di kabupaten Agam, Pesisir Selatan, dan kota Payakumbuh ada beberapa kepala keluarga miskin yang memiliki keterampilan menjadi montir yang dapat melayani perbaikan mobil atau sepeda motor, namun hanya sekitar 4,0% yang memiliki keterampilan tersebut. Demikian pula keterampilan bertukang sekitar 5%, dan keterampilan membawa kendaraan atau sopir 4,0% (Tabel 5).

Tabel 5. Keterampilan Kepala Keluarga

Keterampilan Kepala Keluarga	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Montir	7.7%	3.3%	0.0%	0.0%	5.0%	4.0%
Tukang	1.5%	0.0%	0.0%	20.0%	15.0%	5.7%
Sopir	9.2%	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	4.0%
Listrik	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Menjahit	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%
Tidak Ada	76.6%	96.6%	96.7%	79.9%	80.0%	84.6%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari pemilikan aset rumah tangga, diantara aset yang diharapkan dimiliki rumah tangga antara lain adalah tanah, warung, bengkel, dan kendaraan berupa motor. Dari keseluruhan rumah tangga miskin yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya sedikit yang memiliki aset tersebut. Sebahagian besar (65,1%) tidak memiliki aset dan sekitar 25,1% yang memiliki aset berupa tanah. Hanya beberapa persen saja yang memiliki warung (2,9%), bengkel (0,6%), dan motor (6,3%). Dapat dilihat bahwa di setiap kabupaten/kota dari sampel, sebahagian besar rumah tangga tidak memiliki aset tertentu untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sementara itu kepemilikan aset bagi rumah tangga miskin merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang mata pencaharian mereka. Pada umumnya di kabupaten kota aset yang dapat diandalkan adalah tanah untuk berusaha tani. Namun luasan lahan yang mereka miliki tidaklah begitu luas sehingga tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga mereka (Tabel 6).

Tabel 6. Pemilikan Aset Rumah Tangga Miskin

Aset Dimiliki	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tanah	24.6%	36.7%	53.3%	0.0%	5.0%	25.1%
Warung	1.5%	3.3%	0.0%	3.3%	10.0%	2.9%
Bengkel	0.0%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%
Motor	7.7%	0.0%	0.0%	10.0%	15.0%	6.3%
Tidak Ada	66.2%	56.7%	46.7%	86.7%	70.0%	65.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Kepala rumah tangga petani miskin yang memilliki lahan pertanian hanya sekitar 36,0%, selebihnya menyewa lahan (32,0%), dan meminjam lahan (25,0%). Terdapat sekitar 7,0% kepala rumah tangga yang tidak mempunyai lahan. Pemilikan lahan peranian ini di Kabupaten Pesisir Selatan relatif agak tinggi (40,7%), demikian juga dengan di kabupaten Solok (50,0%). Sedangkan yang menyewa lahan lebih banyak terdapat di kabupaten Agam (42,2%) dan di Pesisir Selatan (44,4%) , seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin

Kepemilikan Lahan	Kabupaten/Kota				Total
	Agam	Pessel	Solok	Payakumbuh	
Milik Sendiri	26.7%	40.7%	50.0%	0.0%	36.0%
Disewa	42.2%	44.4%	3.8%	0.0%	32.0%
Dipinjam	26.7%	7.4%	34.6%	100.0%	25.0%
Tidak Ada	4.4%	7.4%	11.5%	0.0%	7.0%
Total	45	27	26	2	100
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dari kharakteristik lama bekerja dalam sehari pada umumnya kepala keluarga menggunakan waktu selama 5-8 jam dalam sehari (83,4%). Namun terdapat juga kepala rumah tangga yang bekerja lebih dari 8 jam dalam sehari terutama di kota Padang (46,7%) dan di kota Payakumbuh (20,0%). Sedikit sekali (2,3%) yang menggunakan waktu bekrja

di bawah 4 jam dalam sehari (Tabel 8). Walaupun mayoritas kepala rumah tangga bekerja menggunakan waktu 5-8 jam per hari, namun tidak menjamin pendapatan mereka tinggi.

Tabel 8. Lama Bekerja Kepala Keluarga Miskin Dalam Sehari

Lama Bekerja	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
1-4 Jam	0.0%	0.0%	6.7%	3.3%	5.0%	2.3%
5-8 Jam	92.3%	93.3%	93.3%	50.0%	75.0%	83.4%
9-12 Jam	7.7%	6.7%	0.0%	46.7%	20.0%	14.3%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dilihat dari sisi pendapatan per kapita keluarga miskin per bulan, terlihat bahwa pendapatan per kapita keluarga miskin dalam sebulan relatif rendah (Tabel.9). Sebagian besar rumah tangga (68,0%) berpendapatan per kapita di bawah Rp 300,00 per bulan. Hanya sekitar 17,7% berpendapatan per kapita Rp. 300 ribu , dan hanya 6,8% berpendapatan per kapita di atas Rp. 500 per bulan.

Tabel 9. Pendapatan Per kapita Keluarga Per bulan

Pendapatan Perkapita	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
50-<200 Ribu	33.8%	20.0%	53.3%	13.3%	20.0%	29.7%
200-<300 Ribu	44.6%	50.0%	26.7%	30.0%	30.0%	38.3%
300-<400 Ribu	16.9%	20.0%	16.7%	13.3%	25.0%	17.7%
400-<500 Ribu	1.5%	10.0%	3.3%	20.0%	10.0%	7.4%
500-<600 Ribu	1.5%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%	1.7%
600-<700 Ribu	1.5%	0.0%	0.0%	16.7%	15.0%	5.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Dari segi keikutsertaan dalam program keluarga berencana, terlihat bahwa lebih dari separuh (50,9%) rumah tangga miskin tidak ikut program keluarga berencana. Hal ini hampir merata pada setiap kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Di

kabupaten Agam sekitar 44,6% tidak ikut KB, di kabupaten Pesisir Selatan 66,7%, di kabupaten Solok 53,3%, di kota Padang 56,7%, dan di kota Payakumbuh 35,5% (Tabel 10). Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa ketidakikutan ber KB merupakan faktor yang membuat jumlah anggota keluarga banyak sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh kepala keluarga tidak cukup untuk membiaya semua anggota keluarga sehingga rumah tangga ini termasuk dalam rumah tangga miskin. Rendahnya keikutsertaan ber KB bagi rumah tangga miskin ditemukan juga pada penelitian Saputro (2010), dimana secara makro di 15 Provinsi di Indonesia tahun 2007 sebagian besar penduduk miskin belum menggunakan alat KB.

Tabel 10. Keikutsertaan Rumah Tangga Miskin Dalam Program Keluarga Berencana

Keikutsertaan Ber KB	Kota /Kabupaten					Total
	Agam	Pessel	Solok	Padang	Payakumbuh	
Tidak Ikut KB	44.6%	66.7%	53.3%	56.7%	35.0%	50.9%
Ikut KB	55.4%	33.3%	46.7%	43.3%	65.0%	49.1%
Total	65	30	30	30	20	175
	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

KESIMPULAN

Rumah tangga miskin di kampung keluarga berencana di Sumatera Barat umumnya memiliki anak lebih dari 2 orang (62,8%), anggota keluarga lebih dari 4 orang (56,6%), hanya sebagian (49,1%) yang ikut KB, dan pendapatan/kapita dibawah Rp. 400 ribu/bulan (85,7%). Kepala rumah tangga umumnya berumur antara 30-50 tahun (70,3%), berpendidikan SD (54,8%), pekerjaan bertani (57,1%), tidak memiliki lahan sendiri (57,0%), tidak memiliki aset (65,1%), tidak memiliki keterampilan khusus (84,6%), dan lama bekerja 5-8 jam sehari (83,4%).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2015. Juknis Kampung Keluarga Berencana. BKKBN, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2017. Statistik Indonesia 2017. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Indonesia 2018. BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2018. Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017. BPS Sumbar, Padang
- Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Bappenas, Jakarta.
- Haughton, J. and Khandker, S. R. 2009. Hand book on Poverty and Inequality. World Bank, Washington.
- Isdijoso, W., Asep, S dan Akhmadi. 2016. Kertas Kerja Smeru. Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota. The Smeru Research Institute.
- Nopriansyah., J. dan Umiyati, E. 2015. Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan & Pembangunan Daerah. Volume 2, No.3. Januari-Maret. 2015. ISSN : 2338-4603.
- Rejekiningsih, T. W. 2011. Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Struktural. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hal. 28-44.
- Saputro, A. E. dan Utomo, A. P. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro di 15 Provinsi pada tahun 2007. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010, hal. 89-100.

ISBN : 978-602-73463-2-1

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PENYULUHAN,
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Semnas PKP-PM)**

2 MEI 2019



KERJASAMA



Sejak 1910



Diterbitkan Oleh :

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

**PENYULUHAN, KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:**

**“KONTRIBUSI ILMU PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI
PEMBANGUNAN UNTUK MEMPERKUAT KEMANDIRIAN
MASYARAKAT INDONESIA PADA ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0”**

Padang, 2 Mei 2019

Penyunting:

Hery Bachrizal Tanjung

Basril Basyar

Fuad Madarisa

Zulvera

Sri Wahyuni

**Program Pascasarjana Universitas Andalas
Padang, 2019**

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Kontribusi Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan untuk Memperkuat Kemandirian Masyarakat Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0 – Hery Bachrizal Tanjung [et.al] – Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2019.

viii, 707 p.; illus.: 29,7 x 21 cm

ISBN: 978-602-73463-2-1

1. Penyuluhan, Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Judul

Penyunting:

- Hery Bachrizal Tanjung
- Basril Basyar
- Fuad Madarisa
- Zulvera
- Sri Wahyuni

Design dan Layout:

- Sari Muliadi
- Zandri

Administrasi:

- Lucy Nitami Figma
- Nalasari Tanjung

Diterbitkan oleh:

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

Gedung Program Pascasarjana Kampus Limau Manis Padang - 25163

Telp : 0751-71686; Fax: 0751-71691

Website : <http://seminar.pasca.unand.ac.id/pkp-pm-2019>
